

20. Surat Atas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengangguran Pendidikan;  
 21. Surat Kepopesan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat di Dinas Kebudayaan Banten;

**MENUTUP**

Mengakam KEATU	Pendirian Baitul Ma'arif Anak Utsi Dini (PAUD) NAYYIRAH Nama Baitul Ma'arif Jelis Pendidikan : NAYYIRAH Alamat : Jalan Bung Tomo Daerah : Kecamatan Simpang Mamplim Kabupaten : Bireuen Tanggal Pendirian : 25 - 10 - 2017 Nomor Akte Notaris : 13 Tanggal Akte Notaris : 23 - 11 - 2017 Notaris : Abdulrahman, SH Sp.H Penulis Surau Pendidikan : Lambaga Pendidikan Anak Utsi Dini (PAUD) NAYYIRAH Nama Penulis : Ibu Zahra
KEDUA	Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahahan Sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Utsi Dini (PAUD).
KETIGA	Segala biaya yang timbul akibat cikeluaran Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian PAUD NAYYIRAH Kecamatan Simpang Mamplim Kabupaten Bireuen.
KEEMPAT	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab panitia Pendirian PAUD NAYYIRAH Kecamatan Simpang Mamplim Kabupaten Bireuen.
KELIMA	Keputusan ini cikeluaran dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
KEENAM	Keputusan ini Muall berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari (jmyt) terdapat ketelitian dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai menaunya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
K. Sambutan Pendidikan No. 1 Tahun 2016 Nomor 3.123 Permen 15/2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014

BIREUEN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 645 – TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) NAYYIRA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Tamak Karak-Karak (TK) merupakan pelajaran Pendidikan bagi anak-anak yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak dalam memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
  - b. bahwa Pendidikan Tamak Karak-Karak (TK) bertujuan membantu pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengeluaran, ketrampilan, daya cipta dalam menyusun dan mengamalkan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kependidikan, Pengembangan dan Penerapan Kebudayaan Aceh;
  - 2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - 3. Undang – Ucang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  - 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
  - 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006, tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
  - 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014,
  - 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014,